

**KELEMBAGAAN PERTANIAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK Mendukung
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PANGAN
(Agriculture Institutions Based on The Local Wisdom
to Support Food Agribusiness Development)**

E. Prasetyo dan T. Ekowati

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro.

ABSTRAK

Ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengembangan kelembagaan pertanian dan sistem agribisnis mempunyai peran besar dalam menunjang terwujudnya ketahanan pangan yang kokoh. Kelembagaan pertanian dalam pengembangannya perlu diarahkan menjadi kelembagaan ekonomi dengan tujuan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, serta meningkatkan posisi dan kekuatan tawar petani. Melalui pembinaan kelembagaan ekonomi, petani sebagai pelaku utama akan diorganisir dan ditingkatkan kemampuannya melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan (*entrepreneur*). Kelembagaan ekonomi petani idealnya memenuhi prinsip spesifik lokal, prinsip pemberdayaan, dan prinsip kemandirian. Pengembangan agribisnis pangan harus senantiasa memperhatikan masing-masing subsistem di dalamnya, serta memperhatikan karakteristik usaha pada tingkat petani, termasuk kearifan lokal. Di samping itu juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan peranan dan tugas organisasi kelembagaan pertanian, kemanfaatan peraturan dan regulasi pemerintah yang pro petani, serta meningkatkan pemahaman petani melalui pelatihan (*on job training*).

Kata kunci: kelembagaan pertanian, kearifan lokal, agribisnis pangan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7/1996 tentang pangan menyatakan, ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian ketahanan pangan lebih luas dari sekedar kemandirian pangan (Saragih, 2010). Kemandirian pangan telah ditegaskan dalam peraturan perundangan, misal PP No. 68/2002 tentang ketahanan pangan, dinyatakan, (i) pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri; (ii) pengelolaan sistem cadangan pangan ditentukan sendiri sesuai kepentingan nasional, sehingga tidak tunduk pada tekanan negara lain. Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting sebagai indikator keberhasilan, yaitu: (i) ketersediaan pangan, yang berarti pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman; (ii) distribusi, pasokan pangan dapat menjangkau keseluruhan wilayah, sehingga harga stabil dan

terjangkau oleh seluruh rumah tangga; (iii) konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsinya sesuai kaidah gizi dan kesehatan, serta preferensinya.

Tantangan dan permasalahan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sangatlah banyak. Permasalahan pada aspek ketersediaan, meliputi: (i) laju peningkatan kebutuhan pangan yang lebih besar dari pada laju peningkatan produksinya; (ii) terbatasnya infrastruktur irigasi; (iii) meningkatnya jumlah petani kecil dengan luas lahan garapan kurang dari 0,25 ha; (iv) terbatasnya permodalan usaha; (v) lambatnya penerapan teknologi budidaya; (vi) banyaknya pemotongan ternak betina produktif; (vii) gangguan hama penyakit tanaman maupun penyakit ternak; dan (viii) rendahnya produktivitas pangan domestik. Permasalahan pada aspek distribusi, meliputi: (i) terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau semua wilayah, utamanya wilayah-wilayah terpencil; (ii) terbatasnya sarana kelembagaan pasar; (iii) banyaknya pungutan